

LPJ Perbekel Pernah Jadi Sorotan BPK

TABANAN, NusaBali

Terungkap sudah di balik kegelisahan para perbekel se-Tabanan yang berujung minta tambahan alokasi dana desa (ADD). Ternyata, laporan pertanggungjawaban (LPJ) sejumlah perbekel pernah jadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satunya mengenai pendapatan perbekel dan perangkat desa yang tidak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang komposisi ADD 30% biaya operasional dan 70% pembangunan.

Salah seorang perbekel di Tabanan mengatakan, BPK turun ke sejumlah desa pada tahun 2015. Banyak temuan di masing-masing desa yang dijadikan objek pemeriksaan. "Kami tak berani melanggar lagi. Komposisi 30:70 persen sulit diterapkan dan rentan melanggar," ungkap salah seorang perbekel di Tabanan, belum lama ini. Kini pihaknya bersyukur, Pemkab Tabanan menolong para perbekel dengan beri tambahan ADD secara proporsional. Sehingga bisa ikuti ketentuan PP No 43 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati (Perbup) Tabanan Nomor 47 tahun 2014 yang mengatur penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Tabanan, Putu Eka Putra Nurcahyadi mengatakan, hasil konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Desa Kementerian Dalam Negeri sesuai harapan. Dikatakan, rombongan anggota dewan yang dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Ketut 'Boping' Suryadi diterima Direktur Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Kemendagri, Drs Lukman Nul Hakim MSI mengizinkan pemberian honor bisa dimasukkan ke format 70 persen pembangunan sesuai Pasal 100 PP Nomor 47 Tahun 2015. "Simulasi ADD secara proporsional disetujui Dirjen Bina Desa

Kemendagri," ungkap Eka Putra, Selasa (17/1).

Sayang, Kepala Inspektorat Tabanan Gede Urip Gunawan yang dikonfirmasi terkait temuan BPK terkait laporan pertanggungjawaban perbekel belum bisa dihubungi. Upaya lewat media sosial whatsapp juga belum terbalas. Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Tabanan Ida Bagus Wiratmaja mengatakan, selama ini ADD di Tabanan sulit memenuhi PP Nomor 43 tahun 2014 tentang proporsi 30% biaya operasional dan 70% pembangunan. Sebab praktiknya di lapangan, desa yang wilayahnya luas dengan penduduk banyak akan melebihi prosentase 30:70 persen. Sehingga banyak perbekel di Tabanan melakukan pelanggaran PP Nomor 43 Tahun 2014. Berdasarkan PP tersebut disusunlah Perbup tentang pengaturan penghasilan perbekel dan perangkat desa sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 47 Tahun 2014.

Dalam Perbup 47 tahun 2014, perbekel akan mendapat siltap Rp 1.675.000, tunjangan penghasilan Rp 2.325.000, tunjangan Rp 1.000.000, dan honor PTPKD Rp 400.000. Sehingga perbekel dapat *take home pay* sebesar Rp 5.400.000 per bulan. Sebelum ada tambahan ADD sebesar Rp 19,03 miliar, apabila penghasilan ini diterapkan, maka desa yang memiliki banjar dinas lebih dari 5 akan melanggar ketentuan. Rata-rata yang banjar dinasnya di atas 5, persentasenya di atas 40% biaya operasional. "Ini melanggar Pasal 100 PP 43 Tahun 2014 yang tentukan maksimal biaya operasioanl 30%. Inilah biang masalah yang selalu jadi momok buat desa setelah pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa," terang IB Wiratmaja. 📧 k21

Edisi : Rabu, 18 Januari 2017

Hal : 7



Pembangunan Jembatan Kedui-Metra Dilanjutkan Tahun Ini

Bangli (Bali Post) -

Pembangunan jembatan penghubung antara Dusun Kedui Desa Jehem dengan Banjar Metra Desa Yangapi Kecamatan Tembuku akan dilanjutkan tahun ini. Pemkab Bangli melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) sudah menyiapkan anggaran Rp 3,5 miliar. Selain membangun jembatan, Pemkab juga bakal memperbaiki akses jalan menuju jembatan yang selama ini kondisinya sudah rusak.

Camat Tembuku Dewa Agung Purnama, Selasa (17/1) kemarin, membenarkan bahwa pembangunan jembatan yang diidamkan masyarakat sejak lebih dari 10 tahun itu bakal direalisasikan Pemkab Bangli tahun ini. Terkait rencana kelanjutan pembangunan jembatan tersebut, pihaknya bersama Kepala Dinas PU, Kabid Bina Marga serta klian dusun kedua desa tersebut sudah sempat meninjau lokasi.

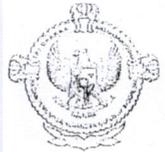
Dijelaskan Agung Purnama, keberadaan jembatan penghubung itu sangat dibutuhkan warga untuk mempersingkat jarak tempuh dari Metra ke Kedui maupun sebaliknya. Selama ini masyarakat di Dusun Metra yang ingin menuju ke Dusun Kedui maupun sebaliknya terpaksa harus melalui jalan memutar dengan jarak yang cukup jauh hingga 10 kilome-

ter. Atau untuk menghindari jalan memutar, sejumlah warga dari dua desa tersebut selama ini terpaksa melintasi jembatan darurat dari bambu yang dibuat warga menggantung di atas jurang. "Warga sangat membutuhkan jembatan permanen itu untuk memperpendek akses menuju pasar, sekolah dan juga layanan kesehatan di puskesmas menggunakan kendaraan," terangnya.

Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas PU Bangli Putu Widangunawan mengungkapkan, guna melanjutkan pembangunan jembatan tersebut pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar. Selain itu pihaknya juga sudah menyiapkan anggaran untuk peningkatan jalan menuju jembatan tersebut. "Kalau ditotalkan anggaran yang disiapkan sekitar Rp 4 miliar," jelasnya. (kmb40)

Edisi : Rabu, 13 Januari 2017

Hal : 8



Miskin, BPJS Suruh Bayar Sendiri

SINGARAJA - Integrasi Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menyisakan sejumlah masalah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) meski memberikan kelonggaran bagi masyarakat miskin yang tercecce, tapi tetap disuruh membayar iuran melalui kepesertaan mandiri.

Hal itu terungkap saat DPRD Buleleng menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan melibatkan pihak BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Buleleng, Dinas Sosial Buleleng, dan para camat yang ada di Kabupaten Buleleng kemarin. Dalam RDP itu, terungkap salah satu masalah yang masih jadi ganjalan dalam integrasi. Salah satunya apabila ada masyarakat miskin yang sakit, namun belum mengantongi JKN. Dikhawatirkan masyarakat itu akan tetap dibebankan biaya perawatan dari puskesmas atau rumah sakit.

Menanggapi hal tersebut, BPJS Kesehatan selama proses integrasi dan peralihan dari JKBM menjadi KIS, masyarakat yang belum terakomodasi dalam JKN, diharapkan mendaftar dan mengikuti program Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Namun, warga tidak gratis. Harus membayar iuran secara mandiri sebesar Rp 30 ribu per bulan. "Misalnya dia sakit *nih*, tapi belum punya KIS. Kami sarankan untuk bulan itu dia ikut PBPU kelas tiga dan meminta rekomendasi dari Dinas Sosial. Dengan rekomendasi dari Dinas Sosial, bisa daftar hari itu, bayar hari itu, aktif hari itu juga, dan dilayani hari itu juga. Normalnya *kan* 14 hari setelah daftar baru bisa aktif. Tapi ini khusus kasus warga miskin dan sakit, selama masa peralihan ini ada kebijakan," ujar Kepala BPJS Cabang Singaraja, Made Sukmayanti.

Pihaknya pun mendorong agar desa dan kelurahan, kembali memvalidasi data yang telah dikirimkan oleh Dinas Sosial Buleleng. Apabila ada yang tercecce, agar segera didaftarkan ke BPJS Kesehatan melalui Dinas Sosial Buleleng. Sementara bila ada yang tidak layak menerima, juga agar dilaporkan sehingga bisa ditarik.

"Kami sarankan agar mengoptimalkan waktu pemuktahiran data setiap bulan itu. Di sini desa harus pro aktif. Biar tidak nanti, setelah jatuh sakit, akhirnya berbondong-bondong ke Dinas Sosial minta rekomendasi," imbuah Sukma.

Di Buleleng sendiri, dari ratusan ribuan peserta JKBM, hanya sebanyak 117.349 jiwa yang didaftarkan ke dalam JKN-BPJS. Celakanya, dari jumlah itu, hanya 86.258 jiwa saja yang lolos verifikasi karena dianggap layak. Bahkan, dari jumlah itu 8.632 kartu ditarik. Sehingga kini di Buleleng hanya menyisakan kuota 39.723 jiwa untuk menjadi peserta JKN melalui penerima bantuan iur (PBI) daerah. (eps/yor)

Edisi : Ramis, 19 Januari 2017

Hal : - 7 -